

ABSTRAK

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA (STUDI KASUS DI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013)

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang pemahaman masyarakat adat Kampung Naga terhadap sistem politik, yang berusaha menyaring pengaruh nilai-nilai baru demi terjaganya kelestarian budaya nenek moyang. Namun disisi lain, letak Kampung Naga yang strategis menjadikan mereka mengalami interaksi yang intensif dengan masyarakat luar. Selain itu, pranata, tata nilai dan unsur-unsur adat lebih banyak dipegang daripada persoalan pembagian peran politik. Kekhasan budaya masyarakat adat Kampung Naga yang dikenal dominan dengan kearifan budaya lokalnya sangat menarik untuk dikaji ketika dikaitkan dengan kondisi politik yang terjadi sekarang ini. Untuk menentukan budaya politik yang dianut oleh masyarakat adat Kampung Naga, peneliti merumuskan masalah yang dikaji berdasarkan pada orientasi politik masyarakat adat tersebut, yaitu: 1. Bagaimanakah orientasi kognitif masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013?, 2. Bagaimanakah orientasi afektif masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013 ?, serta 3. Bagaimanakah orientasi evaluatif masyarakat adat Kampung Naga dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013 ? . Menurut teori Gabriel Almond dan Sidney Verba yang dijadikan landasan atau *grand theory* dalam penelitian ini, mereka mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat adat atau masyarakat tradisional termasuk dalam budaya politik parokial yang mana tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus: kepala kampung, kepala suku adalah merupakan pemancaran peran-peran yang bersifat politis-ekonomis. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat budaya politik ini masih sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif.

Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap permasalahan tersebut di masyarakat adat Kampung Naga adalah pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : teori yang dikemukakan Almond dan Verba ternyata tidak sesuai dengan hasil penelitian. Indikator yang mereka kemukakan, berbeda dengan hasil yang peneliti dapatkan dilapangan. Budaya politik masyarakat adat Kampung Naga adalah budaya politik kaula (subyek) bukan parokial, yang didapat berdasarkan hasil sebagai berikut: 1. Berdasarkan pemahaman orientasi kognitifnya yang melibatkan pengetahuan atas mekanisme *input* dan *output* sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara, masyarakat adat Kampung Naga ‘kendatipun masih sebagian dari mereka’ pada dasarnya memahami dan mengetahui tentang segala sistem politik termasuk *input* dan *output* nya meskipun masih bersifat pasif, sedangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik selalu mereka taati. 2. Masyarakat adat Kampung Naga memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik yang mana pada hakikatnya dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat adat Kampung Naga tersebut. Mengenai masalah perasaan dan ketertarikan masyarakat adat Kampung Naga terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor politisi, serta terhadap pemerintah, tidak ada penentangan atau perasaan tidak suka terhadap semua aspek tersebut, karena pada dasarnya menurut mereka pemerintah itu untuk ditaati bukan untuk dilawan. 3. Apa yang menjadi pilihan masyarakat adat Kampung Naga untuk menjatuhkan pilihan mereka atas dasar perasaan suka terhadap salah satu pasangan calon. Hal tersebut berkenaan dengan informasi yang mereka dapatkan dari sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan KPU Kabupaten Tasikmalaya, tidak hanya itu pola interaksi dan komunikasi yang mereka lakukan dengan pengunjung atau masyarakat luas menambah informasi dan standar nilai terhadap pasangan calon Gubernur, serta keputusan mereka dalam menjatuhkan pilihan murni tanpa ada anjuran atau paksaan dari pihak manapun.

Riza Faisal, 2013

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA (STUDI KASUS DI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ABSTRAK

POLITICAL CULTURE of the INDIGENOUS PEOPLES of KAMPUNG NAGA (CASE STUDIES in INDIGENOUS KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA REGENCY in WEST JAVA GOVERNOR ELECTION, 2013)

Research it is based on about understanding indigenous kampung naga against political system, that seeks sift influence values new terjaganya for sustainability culture ancestors. But at the other side the kampung naga strategic made them subjected to intensive interaction with people outside. Besides, pranata, the value and elements customary more held problem than the division of the role of politics. Particularly culture indigenous kampung naga known dominant with wisdom his local culture strongly attractive to review when associated with political conditions of a is today. To determine political culture which is embraced by indigenous people kampung naga, researchers formulate problems that assessed according to its on political orientation indigenous the namely: 1. How then orientation cognitive indigenous kampung naga in an election west java governor 2013? , 2. How then orientation affective indigenous kampung naga in an election west java governor 2013? and three. How then orientation evaluative indigenous kampung naga in an election west java governor 2013? . According to the theory of Gabriel Almond and Sidney Verba, which provided the runway or grand theory in this research, they argued that the political culture of indigenous or traditional communities included in the parochial political culture where there is no political roles are special: the head of the village, is the tribal chief of the roles are political-economical. In addition the level of public participation in this political culture is still very low, which caused cognitive factors.

The approach used to uncover these problems in indigenous communities is the qualitative approach, Kampung Naga, in methods of case studies. The collection of data in the form of observation, in-depth interviews, literature studies, as well as the study documentation.

Results of the study revealed that: the theory expressed Almond and Verba turned out to be not in accordance with the results of the research. Indicators that they clearly state, in contrast to the research results get in field. Political culture of indigenous political culture is Kampung Naga kaula (the subject) is not parochial, based on the results obtained as follows: 1. based on the understanding of kognitifnya orientation that involves knowledge of input and output mechanisms of the political system, including the knowledge of rights and obligations as citizens, indigenous peoples Kampung Naga% u2018kendatipun is still part of their% u2019 basically understanding and knowing about all the political system including its inputs and outputs though still passive whereas the rights and responsibilities as good citizens always obey them. 2. indigenous peoples have the feeling of Kampung Naga specifically against aspects of the political system which is in fact influenced by the complex value that exists in the indigenous communities of the Kampung Naga. On the issue of feeling and interest in indigenous political system against the Dragon Village, including the role of the actors, politicians as well as against the Government, there is no opposition or a feeling of dislike towards all these aspects, since according to them the Government essentially had to be obeyed rather than to attack. 3. What have been the choice of indigenous Kampung Naga to drop their choices on the basis of the feelings of love toward one candidate. It deals with the information they get from the sosialisasi election conducted by the local government and the ELECTION COMMISSION Tasikmalaya Regency, not only is it a pattern of interaction and communication that they do with visitors or community-wide information and standards adds to the value of candidate against the Governor, as well as their decision in dropping the pure choice without any suggestion or coercion from any party.